

UPAYA DINAS PENGELOLAAN PASAR DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

SABRI, SE., MM

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen PAD ternyata komponen retribusi daerah memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PAD Kota Bukittinggi. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang potensial dan cukup besar tingkat kontribusinya terhadap retribusi daerah Kota Bukittinggi.

Penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi dengan tujuan adalah untuk memperoleh gambaran tentang upaya peningkatan retribusi pasar, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan retribusi pasar dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Diantara upaya intensifikasi itu adalah: menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian, peningkatan SDM pengelola/pegawai, meningkatkan kegiatan penyuluhan. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan menambah atau memperluas jumlah toko, kios, los dan lapangan harian untuk berjualan. Peningkatan retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendorong. Diantara faktor penghambat adalah belum ada standarisasi pelayanan, kurang potensial aparatur, dampak krisis nasional, sistem politik dan keamanan. Sedangkan faktor pendorong adalah : letak yang strategic, SDM yang cukup, adanya potensi pasar yang belum tergali, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan/unit kerja, sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang baik, peraturan perundang-undangan yang akurat, kondisi kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pengguna pasar, maka pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat bekerjasama serta menjalin kemitraan dengan masyarakat sebagai Stakeholder.

Kata Kunci : Upaya Peningkatan Retribusi Pasar

I. PENDAHULUAN

Tugas pokok pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pelayanan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang baik akan terus berupaya memperkuat legitimasinya dengan cara bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi pelayanan yang adil (cepat, tepat, mudah dan nyaman). Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dilakukan tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak

kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Supaya mendapatkan uang dilakukan pemungutan pajak dan retribusi untuk menambah keuangan pemerintah guna membayar gaji pegawai dan biaya pelaksanaan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat. Untuk mendapatkan uang tersebut pemerintah tidak hanya memungut pajak/retribusi, tetapi berkewajiban mendorong memfasilitasi, membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Dengan bertambah dan berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat maka membuat permintaan jasa pelayanan publik semakin besar, dan selanjutnya terjadi penambahan jumlah uang dimasyarakat dan pada gilirannya mempengaruhi pada jumlah uang yang dapat dipungut melalui pajak/retribusi oleh pemerintah. Semakin tinggi pungutan tersebut maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat dari sumber pajak/retribusi maka biaya pembangunan dan operasional pemerintah meningkat. Dengan demikian terjadi sirkulasi keuangan pemerintah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif manajemen pemerintahan pelaksanaan otonomi yang nyata, bertanggung jawab dan dinamis pada hakikatnya untuk menciptakan efisiensi, inovasi dan demokratisasi dalam pemerintahan. Nyata berarti otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. Bertanggungjawab mengandung arti pemberian otonomi diselenggarakan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan diseluruh pelosok tanah air. Dinamis berarti pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Dengan diberikannya otonomi kepada daerah, maka semakin besar pula tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Dengan adanya otonomi daerah, harus diakui masih banyak masalah nyata yang secara obyektif dihadapi oleh pemerintah daerah; mulai dari masalah pengangguran, kemiskinan, kelatarbelakangan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan sampai kepada masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah di daerah. Namun demikian, dalam kenyataan retribusi daerah yang berpotensi digali untuk membiayai pembangunan hanya beberapa jenis saja. Jadi penerimaan retribusi daerah sangat tergantung dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Semakin baik pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah maka penerimaan retribusi daerah semakin meningkat. Sebaliknya semakin jelek pelayanan yang disediakan, maka penerimaan retribusi daerah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kota Bukittinggi adalah salah satu dari kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah paling kecil diantara kota lainnya yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah diantara kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat terdapat perbedaan yang cukup bervariasi. Kota Padang dan Kota Bukittinggi menunjukkan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Bagi Kota Bukittinggi dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pemerintahannya telah pula menyebabkan pertumbuhan aktivitas pemerintahan dengan pengembangan kebijakan publik, terutama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang ada. Dengan karakteristik wilayah Kota Bukittinggi yang memiliki sumber daya alam terbatas, maka Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan strategi mengembangkan sektor pariwisata dan perdagangan.

Masalahnya, Kota Bukittinggi belum mempunyai sarana transaksi perdagangan lokal yang moderen seperti mall sebagaimana yang dapat ditemukan pada kota-kota besar, seperti Padang, Medan, misalnya. Oleh karena itu maka pasar menjadi sarana utama transaksi perdagangan, maka pasar membutuhkan penanganan dalam hal pengelolaan dan pembinaan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun pelayanan yang diberikan.

Untuk mencermati masalah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, khususnya yang diberi wewenang dibidang pendapatan retribusi pasar, dan karena itu berkedudukan sebagai koordinator dalam pembinaan retribusi pasar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kota Bukittinggi. Dari hasil studi pendahuluan dilapangan, ada indikasi bahwa upaya Kota Bukittinggi dalam meningkatkan retribusi pasar masih menghadapi kendala. Diduga berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kendala tersebut, sehingga telah mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pengelola Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar di Kota Bukittinggi.

II. TINJAUAN SECARA TEORI

2.1. Upaya

Upaya menurut Poerwadaminta (1995:134) adalah suatu kegiatan dengan mengarahkan pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan. Usaha dalam suatu pekerjaan merupakan perbuatan daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Menurut Widjana dalam MPLA (1995:47) upaya mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilandasi oleh kemauan baik dalam menguasai problem-problem yang akan atau sedang terjadi

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah, untuk itu sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatannya.

Pendapatan adalah hasil guna atau perolehan, sedangkan asli adalah asal, semula, yang sebenarnya yang berasal dari daerah sendiri (Purwanto, 1998:228). Sedangkan Widjaja (1998:42) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam dana pembangunan atau memenuhi belanja daerah. Selanjutnya Moenir (2001:110) menyatakan bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan/atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, natura maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu.

Pendapatan daerah adalah semua perolehan uang/dana bagi daerah yang digunakan untuk pembiayaan urusan-urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan didaerah baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari bantuan pemerintah atasan dari pinjaman. Pendapatan Asli Daerah yaitu sejumlah uang atau dana yang diperoleh dari usaha daerah itu sendiri dengan kewenangan yang ada padanya. Jadi yang betul-betul berasal dari daerah itu sendiri.

2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 1997:153). Sedangkan Soedargo (1964:1) menyebutkan bahwa retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Contoh retribusi adalah retribusi pelayanan untuk berdagang pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk berjualan dipasar pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa berjualan dipasar Pemerintah Daerah.

2.4 Retribusi Pasar

Suparmoko (1997:94) memberikan pengertian tentang retribusi pasar yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat membayar apa yang telah dinikmati secara langsung berupa pelayanan fasilitas sarana dan prasarana pasar. Sedangkan pemerintah menyediakan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan itu.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Nazir (2003:54) dikatakan bahwa "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Menurut Azwar (2001:40) cara berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat lewat observasi menuju kepada suatu teori, dengan kata lain induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Sedangkan Sutrisno Hadi (1991:42) menyatakan bahwa pendekatan induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai suatu obyek penelitian yang kemudian diteliti, dan selanjutnya dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti berusaha menggambarkan data atas gejala di lapangan yang bersifat khusus kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

3.2. Populasi Dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2005:90) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Selanjutnya Nazir (2003:273) menyatakan populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi.

3.2.2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian adalah sebagai pertimbangan efisiensi waktu, tenaga dan biaya serta mengarah pada permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian populasi.

Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut H. Nawawi (1998:157) dipahami sebagai pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ukuran sampel tidak diperhitungkan, perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit sampel yang dihubungi, disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan tujuan penelitian.

Sugiyono (2005:96) mengemukakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya Arikunto (2002:117) menyatakan bahwa :

- a) *Purposive sampling* merupakan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.
- b) Penelitian bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - 1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang menggambarkan ciri-ciri pokok populasi;
 - 2) Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjects*); dan
 - 3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi penahuluan.

3.3. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2002:96) menyatakan bahwa variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa terdapat variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat alam suatu penelitian. Variabel yang mempengaruhi disebut penyebab, variabel bebas atau *independent variabel* (X), sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, atau *dependent variabel* (Y).

Menurut Sugiyono (2005:38-39) mengemukakan bahwa :

- a. Variabel adalah konstruk (*construct*) atau sifat yang dipelajari, selanjutnya juga dijelaskan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different falues*), dikemukakan oleh Kerlinger (1973).

- b. Hatch dan Farhady (2002:20) mendefinisikan variabel sebagai atribut dari seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel tunggal (variabel bebas) yaitu Upaya Dinas Pengelolaan Pasar. Retribusi pasar sebagai bagian dari PAD maka untuk meningkatkan potensi dan realisasinya menyangkut aspek ekstensifikasi dan intensifikasi sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan sub variabel ekstensifikasi dan intensifikasi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan tempat dimana lokasi penelitian dilakukan yakni Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

a. Wawancara/Interview

Menurut Arikunto (2002:132) interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam bagian lain Arikunto (2002:132) menyatakan bahwa :

Ditinjau dari pelaksanaannya, maka wawancara dibedakan atas :

1. Interview bebas, *inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan ikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman (ancer-ancer) apa yang akan ditanyakan.
2. Interviui terpimpin, *guided interview*, yaitu interviui yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interviui terstruktur.
3. Interviui bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interviui bebas dan interviui terpimpin.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai sumber informasi yang mempunyai otoritas atau wewenang baik dengan pedoman wawancara secara struktur maupun bebas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan retribusi pasar di Kota Bukittinggi.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Sedangkan Moleong (2005:216) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis maupun film. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh oleh penulis dengan cara pencatatan atau fotocopy terhadap buku-buku, publikasi dan laporan dari instansi terkait yaitu Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Data-data tersebut dipelajari yang kemudian ditelaah oleh penulis.

c. Observasi/pengamatan

Menurut Nazir (2003:175) menyatakan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang

diteliti sehingga peneliti melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya, selanjutnya dilakukan pencatatan terhadap kejadian yang ada dilokasi penelitian. Selanjutnya Sugiyono (2005:166) menyatakan teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlaui besar. Dalam hal ini penulis melakukan observasi tidak terstruktur terhadap organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi agar diperoleh keadaan yang sebenarnya dan gambaran secara konkret terhadap obyek yang diteliti.

3.4.2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:107) yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam pemilihan dan penentuan sumber data tergantung pada permasalahan yang diselidiki dan hipotesa yang hendak diuji kebenaran atau ketidak benarannya.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) melalui wawancara dan observasi berupa lisan atau tulisan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dan observasi terhadap aparat Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau laporan. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui sumber lain, catatan, statistik, dokumen-dokumen, buku-buku, dan sebagainya yang diperoleh dilapangan yakni dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi seperti penerimaan retribusi pasar dalam satu tahun, dan lain-lain. Data ini berguna sebagai pemandu karena diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh oleh peneliti dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang terkait dengan masalah retribusi daerah dan retribusi pasar.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Editing

Yaitu pengecekan data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan atau keterkaitan dengan waktu atau masalah yang ada.

2. Klasifikasi data

Yaitu penggolongan data yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas dan kesimpulan yang tepat.

3. Tabulasi data

Yaitu merumuskan data dalam bentuk tabel, sehingga mempermudah penulis untuk menganalisis dan mencari maknanya.

4. Interpretasi data

Yaitu kegiatan untuk mencari makna dan arti yang lebih luas dari data yang ada dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan dan fenomena di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dengan data yang valid, lengkap dan sudah ditabulasikan diharapkan akan mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Peningkatan Retribusi Pasar di Kota Bukittinggi

1. Intensifikasi

Upaya peningkatan retribusi pasar yang dilakukan secara intensifikasi merupakan upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang dilakukan melalui peningkatan faktor-faktor internal dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Diantara upaya intensifikasi itu adalah :

a) Pendataan Ulang Subyek dan Obyek Retribusi Pasar

Pendataan ulang subyek dan obyek retribusi pasar dilakukan melalui peremajaan retribusi pasar yang dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Pengelola Pasar Kota Bukittinggi atas wewenang dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi. Kemudian Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi menyesuaikan hasil laporan dengan kondisi lalu dan hasil pengawasan langsung ke lapangan. Setiap dua kali sebulan Dinas Pendapata Daerah Kota Bukittinggi melakukan pengawasan atau turun kelapangan secara bergiliran. Dalam pengawasan ini diperoleh informasi tentang penambahan dan pengurangan jumlah subyek dan obyek retribusi pasar. Disamping itu karena letak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi di lokasi Pasar Atas juga mendukung pengawasan secara tidak langsung oleh para aparat.

b) Peningkatan Kompetensi, Kreativitas dan Persepsi Administrator

Kemampuan administrasi pegawai Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi merupakan wujud karakteristik pekerja serta mempengaruhi efektivitas organisasi. Hal ini sangatlah mungkin karena dengan melihat kemampuan administratif pegawai maka akan terwujud suatu bentuk penyelesaian kegiatan kerja dengan cepat dan tepat pada waktu penyelesaiannya. Dengan adanya kualitas pegawai yang baik, dari tingkat pendidikan formal pegawai dan jenjang pendidikan karier pegawai yang merupakan tersedianya SDM yang andal, maka semangat kerja dan mutu pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan proses manajemen yang telah ditentukan. Jadi, dengan melihat kemampuan pegawai, baik dari segi pendidikan formal maupun jenjang pendidikan kariernya, akan terlihat kemampuan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggungjawab sebagai pegawai. Hal inilah yang berpengaruh terhadap efektivitas dalam peningkatan retribusi daerah.

Dari hasil penelitian ini ditemukan juga bahwa kompetensi, efektivitas dan persepsi administrator merupakan aspek-aspek manajerial yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Keterkaitan hubungan antara kompetensi, kreativitas dan persepsi administrator pemerintah terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.

c) Penetapan Tarif Retribusi Pasar

Penetapan tarif retribusi pasar di Kota Bukittinggi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa serta biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

B. Ekstensifikasi

Upaya peningkatan retribusi pasar secara ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar yang dilakukan melalui perluasan areal atau lokasi pasar yang meliputi penambahan jumlah toko, los, payung dan bangku serta memperluas areal lapangan bulanan dan lapangan harian. Dengan kata lain cara ekstensifikasi dilakukan dengan menambah dan meningkatkan jumlah potensi

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai upaya Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi dalam meningkatkan retribusi pasar adalah
 - a. Intensifikasi
 - 1) Pendataan ulang subyek dan obyek retribusi pasar
 - 2) Peningkatan kompetensi, kreativitas dan persepsi administrator
 - 3) Penetapan tarif retribusi pasar
 - b. Ekstensifikasi
 - 1) Koordinasi dan kerjasama
 - 2) Meningkatkan jumlah took dan los
 - 3) Sosialisasi/penyuluhan
2. Peningkatan retribusi pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
 - a. Faktor Penghambat
 - 1) Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar
 - 2) Tariff retribusi pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi
 - b. Faktor Pendorong
 - 1) Letak kota dan pasar yang strategis
 - 2) Penyelenggaraan otonomi daerah
 - 3) Penerapan Good Governance

2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

1. Pertumbuhan retribusi pasar yang cenderung menurun maka perlu adanya peran aktif Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk melakukan pendataan ulang

- subyek dan obyek retribusi pasar tersebut. Pengenaan tarif retribusi pasar harus disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan.
2. Kontribusi (share) retribusi pasar terhadap PAD yang cenderung menurun untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi lebih realistis dalam menentukan target penerimaan sehingga tidak terkesan hanya mengejar pemasukan. Timbale balik yang diharapkan masyarakat perlu direalisasikan, misalnya perbaikan fasilitas umum yang berkenaan dengan aktivitas obyek retribusi pasar sehingga mendukung peningkatan retribusi pasar tersebut.
 3. Pemerintah Kota Bukittinggi agar lebih realistis dalam menentukan dan menetapkan target penerimaan retribusi pasar dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi yang sebenarnya.
 4. Tingkat efektivitas perlu perhatian khusus dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota Bukittinggi karena tingkat efektivitas cenderung menurun.
 5. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat (stakeholder). Dan perlu bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menganjurkan beberapa pekerjaan atau sektor ekonomi lainnya kepada masyarakat seperti membuat kerajinan tangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2003, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2000, Metodologi Research, Jilid I, Andi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, Manajemen Keuangan Daerah, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kaho, Josef, Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya), Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, 2004, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko, M, 1997, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, BPFE, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Umar, Husein, 2004, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, AW, 1998, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2001 Tentang

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Distribusi Pasar

Surat Keputusan Walikota Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Eselon II, III dan IV Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi

C.Lain-Lain

Santoso, Bagus, 1995, Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Ash Daerah, Prisms Tahun XXIV, No 4 (19-28)

Krisnaldi, Deded, 2001, Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Bukittinggi, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM.

Yandi, Gustafa, 1996, Kinerja Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Pembangunan di Kotamadya Banjarmasin, 1991-1996, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM.